

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad santosa, Mas. *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001
- Andi Gadjong, Agussalim. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1981
- Basah, Sjachran. *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya, 1995
- Brotosusilo, Agus et al. *Penulisan Hukum : Buku Pegangan Dosen*. Jakarta : Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen PDK, 1994.
- Departemen Pertambangan dan Energi, *50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan*. Jakarta, 1995.
- Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi, *Kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 Tahun Mendatang*, Jakarta, 1995.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*, UII Press, Jogjakarta, 2007
- Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2008.
- Kartasapoetra, R.G. *Sistematika Hukum Tata Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina cipta, Bandung, 1979
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, 2005.
- Manan, Bagir. *Beberapa Catatan Atas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, FH-UNPAD, Bandung, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- MD, Mahfud. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.



- Tim Peneliti FH UNPAD, *Dalam Seminar Tentang Perizinan Penggunaan Tanah Pantai*, Bandung, 1993
- Utrecht, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*
- Widiyanti, Ninik dan Sunindhia. *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Zuhail. *Visi Iptek Memasuki Milenium III*, Cet. 1, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.

### **Artikel / Makalah/Pidato ilmiah/Disertasi**

- Arizona, Yance. “Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme : Demokrasi dibawah Tirani Modal, Selasa 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia);
- Djayaputra, Gunawan. *Aspek Yuridis Peranan Audit Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, dalam Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia, 75 Tahun Prof. Koesnadi Hardjosoemantri, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
- Saleng, Abrar. “Risiko-Risiko Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dari Prespektif Hukum Pertambangan.” *Jurnal Hukum Bisnis Volume 26* (No. 2 Tahun 2007);
- Sigit, Soetaryo. *Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia*, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB, Bandung, 9 Maret 1996
- Situmorang, Sodjuangon. *Model Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten /Kota*, Disertasi, PPS Fisip UI, 2002
- Suhardjo, Sussongko. *Masa Depan Peran Pemda dalam Pengembangan Ekonomi Daerah*, Artikel lepas
- Syafrudin, Ateng. *Perizinan Untuk Kegiatan Tertentu*, Majalah Hukum. Media Komunikasi FH Unpas, Edisi 23, Tahun 1997

- Wahyudi Hertanto, Ari. *Kontrak Karya (Suatu Kajian Hukum Keperdataan)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-38 No. 2 April-Juni 2008;
- Yusgiantoro, Purnomo. “*Kebijakan dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sektor Pertambangan Dan Energi*”, Makalah disampaikan dalam seminar nasional Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Dalam Era Otonomi Daerah dari Prespektif Kemandirian Lokal di Makassar, 22-23 Februari 2001;

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota